

# PRILAKU NON VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH LAMPUNG TIMUR TAHUN 2015

(Studi Di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)

**Suwondo, Darmawan Purba**

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Lampung

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Lampung

Email: suwondo.1959@fisip.unila.ac.id

## ABSTRACT

*On December 9, 2015 Lampung province has carried out the Local Leaders Election simultaneously in 8 Regency / City, but the number of abstainers were still high. East Lampung Leaders Election is one of elections with the highest number of abstainers, as many as 289.351 voters or 36.42% were abstained. This number is even greater than the votes of candidates elected which was 263.926 or 33.22%. This fact is interesting to be seen in the context of non-voting behaviors that affect voters that they do not vote in the election. Conceptually non-voting behavior can be mapped into 4 groups: (1) political technical factors; (2) technical factors; (3) political factors; and (4) ideological factors. This research was conducted in Way Jepara District by interviewing 100 respondents that were chosen through multi-stage random sampling. In addition, the data of the research is also supported by the results of interviews conducted to members of the Election Commission of East Lampung. The research found that 51% of respondents enrolled in the Electoral Register were; 44% had moved before the election, 4% died and 3% seriously ill / lost consciousness. Only 49% of respondents could be encountered in this study and the results showed 12% of respondents did not choose because of political factors, 8.16% due to political technical factors and 4.08% because of ideological factors. Generally, as many 37 respondents or 75% did not vote due to technical factors, for example, one does not choose because of the conditions and situations that hamper the voters to come to the polling stations. Some of the major indicators are; (1) family requisite, (2) health, (3) do not remember or forget, and (4) working consideration. In line with the evaluation results by the Election Commission of East Lampung, steps that need to be done to improve voters participation rates in order to reduce abstained are namely: (1) improving the population administration, (2) building an actual system of administration. (3) spreading more widely and evenly voters education, (4) disseminating the election process long before the election day and strengthening institutionally the organizers of local leaders election.*

**Keywords:** local leaders elections, participation and abstained

## ABSTRAK

*Pada 9 Desember 2015 di Provinsi Lampung terlaksana pemilihan kepala daerah serentak 8 Kabupaten/ Kota, namun angka golput masih tinggi. Pilkada Lampung Timur merupakan salah satu pilkada dengan angka golput tertinggi sebanyak 289.351 pemilih atau 36,42% golput, angka golput ini bahkan lebih besar dibandingkan perolehan suara calon bupati terpilih sebesar 263.926 atau 33,22%. Fakta tersebut menarik untuk dilihat dalam kontek prilaku non voting yang mempengaruhi pemilih sehingga tidak menggunakan suaranya saat pilkada. Secara konseptual prilaku non voting dapat dipetakan dalam 4 kelompok yaitu: (1) faktor teknis politis; (2) faktor teknis; (3) faktor politis; dan (4) faktor ideologis. Penelitian ini di dilaksanakan di Kecamatan Way Jepara, dengan mewawancarai sebanyak 100*

responden yang dipilih secara multy stage random sampling. Selain itu data penelitian didukung hasil wawancara dengan anggota KPUD Lampung Timur. Hasil penelitian menemukan bahwa, sebanyak 51% responden yang terdaftar di DPT ternyata 44% sudah pindah sebelum pemilihan, 4% meninggal dunia dan 3% sakit keras/hilang kesadaran. Hanya 49% responden yang dapat ditemui dalam penelitian ini dan hasilnya menunjukkan 12% responden tidak memilih karena faktor politis, 8,16% karena faktor teknis politis dan 4,08% karena faktor ideologis. Umumnya sebanyak 37 responden atau 75% tidak ikut memilih dikarenakan faktor teknis, yaitu seseorang tidak memilih karena kondisi dan situasi yang menghambat pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara. Beberapa indikator utamanya; (1) Keperluan keluarga, (2) Kesehatan, (3) Tidak ingat atau lupa, dan (4) Pertimbangan pekerjaan. Sejalan dengan hasil evaluasi KPUD Lampung Timur langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih sehingga dapat mengurangi golput antara lain: (1) penyempurnaan administrasi kependudukan, dan (2) membangun sistem administrasi kependudukan yang aktual. (3) pendidikan pemilih semakin secara luas dan merata, (4) sosialisasi proses pilkada jauh-jauh hari dan penguatan kelembagaan penyelenggara pemilihan kepala daerah.

**Kata Kunci:** Pemilihan Kepala Daerah, Partisipasi dan Golput

## PENDAHULUAN

Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan bahwa warga yang memiliki hak memilih pada pasal 56 adalah warga yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah, dan harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bagi warga yang tidak terdaftar dapat menggunakan KTP sebagai daftar pemilih tambahan (DPTb). Berdasarkan ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa partisipasi memilih merupakan hak bukan suatu kewajiban. Di beberapa negara, partisipasi diposisikan sebagai suatu kewajiban, contohnya di Australia. Di Indonesia partisipasi merupakan hak warga negara, baik hak memilih maupun tidak memilih. Namun demikian, pemerintah melalui KPU terus berupaya dengan berbagai bentuk sosialisasi meningkatkan partisipasi pemilih.

Permasalahan partisipasi memiliki nilai penting dalam pemilihan kepala daerah, hal ini menyangkut legitimasi politik terhadap hasil pilkada. Selain itu, partisipasi juga menjadi indikator evaluasi terhadap kinerja KPU/KPUD khususnya dalam menyelenggarakan pilkada. Hal mendasar lainnya, partisipasi masyarakat dapat menjadi ukuran evaluatif terhadap kepercayaan masyarakat tentang demokrasi dan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Pilkada langsung sebagai kehendak rakyat tidak menemukan relevansinya ketika partisipasi pemilih tidak memenuhi standar minimal partisipasi. Sebagai contoh di Provinsi Lampung, dari 8 daerah yang melaksanakan pilkada menunjukkan capaian rata-rata partisipasi pemilih hanya 69,48%.

**Tabel 1.** Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak di Provinsi Lampung Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih	Memilih	Partisipasi %
1	Metro	112.372	86.744	77,19
2	Pesisir Barat	104.647	80.407	76,84
3	Pesawaran	334.288	234.245	70,07
4	Way Kanan	333.639	231.710	69,45

5	Lampung Selatan	731.291	496.901	67,95
6	Bandar Lampung	632.079	418.916	66,28
7	Lampung Tengah	961.970	624.795	64,95
8	Lampung Timur	794.576	505.225	63,17
<b>Rata-Rata Tingkat Partisipasi</b>				<b>69,52</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Berdasarkan data pada tabel 1, menginformasikan bahwa partisipasi tertinggi terdapat di Kota Metro 77,19% dan Kabupaten Pesisir Barat dengan capaian 76,84%, namun demikian angka partisipasi tersebut belum mampu menembus target yang dicanangkan oleh KPU sebesar 77,5%. Sedangkan partisipasi terendah terjadi di Kabupaten Lampung Timur hanya sebesar

63,17%. Dengan jumlah tingkat partisipasi yang rendah tersebut tentunya menjadi ukuran tertentu, yaitu: *pertama*, legitimasi politik terhadap kepala daerah terpilih; *kedua*, kinerja KPUD Lampung Timur dalam menyelenggaraan pilkada, terkait pengelolaan DPT dan sosialisasi pilkada; *ketiga*, kepercayaan terhadap demokrasi dan sistem pemilihan kepala daerah.

**Tabel 2.** Distribusi Suara Berdasarkan DPT Pilkada Lampung Timur

Komponen Pembagi Suara	Jumlah Suara	(%) Persen
Yusran Amirullah dan Sudarsono	232.473	29,26
Chusnunia dan Zaiful Bokhari	263.926	33,22
Suara Tidak Sah	8.826	1,11
<b>Non Voting</b>	<b>289.351</b>	<b>36,42</b>
(Total Suara (DPT	794.576	100

Sumber: Diolah dari Data KPUD Lampung Timur 2015

Hasil akhir dari pemilihan kepala daerah Lampung Timur yang dimenangkan pasangan Chusnunia Chalim dan Zaiful Bukhari 53,17% mengalahkan saingannya Yusran Amirullah dan Sudarsono 46,83%. Meskipun memenangkan pilkada Lampung Timur, secara faktual perolehan suara Chusnunia Chalim dan Zaiful Bukhari tidak lebih besar dibandingkan jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya atau *non voting*. Angka *non voting* (golput) seperti pada tabel 2 mencapai 36,42% atau setara dengan 289.351 suara dari total DPT sebanyak 794.576 suara. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan perolehan suara pemenang pilkada sebanyak 263.926 suara atau seta dengan 33,22% berdasarkan DPT. Data tersebut menjelaskan bahwa *non voting* menjadi pemenang sesungguhnya dalam Pilakda Lampung

Timur tahun 2015. Hal ini menjadi tantangan bagi calon terpilih untuk secara optimal memimpin Lampung Timur dengan legitimasi yang minim, serta pekerjaan rumah tangga KPUD untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan pilkada selanjutnya.

Berdasarkan tingkat partisipasi kumulatif di Kabupaten Lampung Timur sebesar 63,17% yang tersebar di 24 kecamatan menunjukkan kecamatan Bumi Agung dan Batang Hari Nuban sebagai kecamatan yang memiliki tingkat partisipasi tertinggi di atas 70%. Sedangkan kecamatan dengan partisipasi dibawah 60% tersebar di tujuh kecamatan, yaitu: Braja sebelah, Jabung, Way Jepara, Gunung Pelindung, Labuhan Ratu, Labuhan Maringga dan Pasir Sakti.

Fenomena *non voting* ini menarik untuk terus dikaji, sebagai bentuk evaluasi dalam menemukan masalah-masalah yang menyebabkannya. Selain itu, perbaikan kualitas demokrasi yang ditandai dengan tingginya tingkat partisipasi harus terus dikembangkan. Namun demikian untuk melihat fenomena *non voting* secara lebih khusus dan mendalam penelitian ini difokuskan di satu kecamatan yaitu kecamatan Way Jepara dengan mempertimbangkan bahwa Kecamatan ini memiliki akses yang baik, kondisi sosial dan ekonominya cukup baik, namun demikian tingkat partisipasi pemilihnya tergolong rendah.

### PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH

Sarundajang dalam bukunya *Pilkada Langsung* (2011:117) mengatakan bahwa Pilkada sebagaimana pemilu nasional merupakan sarana untuk memilih dan mengganti pemerintahan secara damai dan teratur. Melalui pilkada, rakyat akan secara langsung memilih pemimpinnya di daerah sekaligus memberika legitimasi kepada siapa yang berhak dan mampu untuk memerintah. Pilkada dengan kata lain merupakan seperangkat aturan atau metode bagi warga negara untuk menentukan masa depan pemerintahan yang absah (*legitimate*).

Selanjutnya Suharizal (2011:7) berpendapat secara filosofis munculnya gagasan tentang pilkada secara langsung itu pada dasarnya merupakan proses lanjut dari keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah-daerah yang sedang dimulai. Pilkada langsung diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang kredibel dan didukung oleh rakyat.

Pada prinsipnya pemilihan kepala daerah langsung merupakan refleksi dari demokratisasi yang mencerminkan adanya kedaulatan rakyat dan legitimasi kekuasaan pemerintah daerah secara bersamaan. Pemilihan kepala daerah secara langsung menggambarkan adanya sebuah mekanisme pembentukan pemerintahan yang terlegitimasi karena merupakan hasil dari proses politik yang telah disesuaikan dengan aturan perundangan yang berlaku, serta sarana

berpartisipasi masyarakat dalam kegiatan politik lokal.

Partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari partisipasi politik pada umumnya, kesuksesan dan keberhasilan dari penyelenggaraan pemilihan tersebut tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dengan segala bentuk spesifiknya, namun terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini ialah partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan pemungutan suara yaitu partisipasi masyarakat yang tidak memilih / tidak menggunakan hak pilih / golput.

Seperti yang telah dijelaskan Surbakti (2010:185), berkenaan dengan partisipasi politik, keikutsertaan warga negara dalam proses pemilihan khususnya kegiatan pemungutan suara merupakan serangkaian kegiatan pembuatan keputusan untuk menentukan pemimpin dari pemerintahan daerah tersebut, apakah akan memilih atau tidak memilih. Tidak memilih berarti bisa dikatakan seseorang tersebut memiliki hak pilih namun tidak menggunakan hak pilih.

Eef Saifulloh Fatah berpendapat bahwa "golput" tidaklah mewakili sebuah kalangan atau kelompok politik homogen, dalam konteks memilih sebagai hak, golput mewakili sebuah spektrum luas dan beragam, dalam menjawab tentang Fenomena golput Eef Saifulloh Fatah dalam Pahmi Sy (2010:68-69) menyebutkan beberapa faktor penyebab terjadinya golput, antara lain:

- 1) Faktor teknis, tidak memilih karena situasi dan kondisi yang mendesak seperti adanya keluarga wafat, ketiduran, kelelahan, sakit, karena harus bekerja, dan lain-lainnya.
- 2) Faktor teknis politis, seperti tidak mendapat undangan karena tidak terdaftar sebagai pemilih (tidak masuk dalam daftar pemilih tetap) atau disengaja tidak diberikan undangan oleh pihak panitia walaupun sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
- 3) Faktor politis, yaitu adanya perasaan dari mereka yang merasa tidak punya pilihan dari kandidat atau partai yang tersedia, mereka

tidak percaya pemilu dan pilihan mereka membawa perubahan terhadap kehidupan mereka.

- 4) Faktor ideologis, masyarakat tidak percaya pada mekanisme demokrasi yang dianggap liberal, juga pada lembaga pemerintah selaku penyelenggara, untuk itu mereka tidak mau terlibat di dalamnya.

Merujuk pada pendapat sejumlah ahli, untuk melihat perilaku *non voting* (golput) dalam pilkada di Kabupaten Lampung Timur lebih relevan dipotret dengan konsep yang dikemukakan oleh Eef Saifulloh Fatah. Berdasarkan empat indikator tersebut dapat melihat indikator yang paling dominan mempengaruhi perilaku *non voting*. Telaah terhadap indikator perilaku *non voting* tersebut selanjutnya menggambarkan penyebab rendahnya partisipasi pemilih dalam pilkada Lampung Timur 2015.

**FAKTOR-FAKTOR YANG  
 MEMPENGARUHI PRILAKU *NON VOTING***

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 100 responden yang terpilih secara acak menunjukkan

bahwa tidak semua responden yang telah ditentukan dapat ditemui. Terdapat beberapa alasan utama yang menyebabkan responden tidak dapat ditemui atau diwawancarai. Responden yang dapat diwawancarai dihasilkan informasi tentang faktor yang mempengaruhi perilaku *non voting* di Kecamatan Way Jepara.

Hasil penelitian menemukan bahwa penyebab pemulaan perilaku *non voting* adalah tidak akuratnya data pemilih tetap. Bahkan temuan peneliti menunjukkan 51% responden tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu: (1) sudah tidak berdomisili lagi di Kecamatan Way Jepara; (2) sudah meninggal dunia; dan (3) sakit parah.

Berdasarkan hasil penelitian, pengelompokan perilaku *non voting* didasarkan pada empat faktor, yaitu teknis politis, teknis, politis dan ideologi. Hasil penelitian terhadap 49 responden yang dapat diwawancarai menunjukkan bahwa mayoritas responden atau sebanyak 37 responden (75%) tidak memilih disebabkan faktor teknis.

**Tabel 3.** Faktor Utama Responden Tidak Memilih

Faktor Utama Tidak Memilih	Frek	Persen
Teknis Politis	4	8,2
Teknis	37	75,5
Politis	6	12,2
Ideologis	2	4,1
Total	49	100,0

Sumber : Hasil Penelitian, 2016

Pertimbangan responden lainnya tidak memilih sesuai data tabel 3 disebabkan faktor teknis politis sebanyak 4 responden atau 8,2%. Sedangkan faktor politis 12,2% dan sisanya sebanyak 2 responden atau 4,1% dikarenakan faktor ideologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab perilaku *non voting* dalam

pilkada Lampung Timur lebih disebabkan faktor teknis.

Sejumlah, kajian menilai terdapat beberapa penyebab utama semakin menurunnya partisipasi masyarakat. Hasil kajian Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), mengungkapkan

bahwa terdapat 3 faktor utama menurunnya tingkat partisipasi dalam pilkada serentak tahun 2015, yaitu:

“*Pertama*, terbatasnya pilihan pasangan calon dari yang diajukan partai politik. Mayoritas daerah Pilkada yang hanya diikuti oleh 2 sampai 3 pasangan calon tidak secara maksimal mengakomodasi aspirasi masyarakat pemilih. *Kedua*, perbedaan antara janji kampanye dengan realitas politik nasional. Mayoritas materi kampanye pasangan calon adalah pemberantasan korupsi, pengelolaan pemerintahan yang transparan dan pengalokasian anggaran yang memihak rakyat. *Ketiga*, menurunnya aktivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih

oleh penyelenggara Pilkada. Persepsi masyarakat terkait bahan kampanye yang disediakan oleh KPU masih dipahami secara politis dilakukan oleh pasangan calon, sementara jumlah kegiatan sosialisasi tatap muka oleh penyelenggara pilkada berkurang”.

Selain pandangan JPPR, masih banyak hasil kajian yang menguarakan tentang penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada pilkada serentak tahun 2015. Rendahnya partisipasi bukan hanya terjadi di Lampung Timur, tetapi merata di seluruh Indonesia. Namun demikian, informasi tentang pilkada dan arti penting pilkada bagi keberlangsungan pembangunan di masyarakat masih belum sesuai harapan. Hal ini juga menjadi temuan dalam penelitian, seperti data pada tabel 4.8.

**Tabel 4.** Sumber Utama Informasi Tentang Pilkada

Lembaga / Komunitas	Sumber Info Saat Pilkada	Lembaga yang Seharusnya Memberi Info Pilkada
KPUD	10,81	44,90
Panwas Kab	0,00	4,08
Berita di Koran/TV	8,11	4,08
Partai Politik	24,32	16,33
Tokoh Masyarakat	27,03	16,33
Sahabat/Tetangga/ Keluarga	29,73	8,16
TT/TJ/R	0,00	6,12
Total	100,00	100,00

Sumber : Hasil Penelitian, 2016

Data pada tabel 4 menunjukkan bahwa, sumber utama responden dalam mengakses informasi tentang pemilihan kepala daerah paling banyak justru diperoleh dari sahabat/tetangga/keluarga sebesar 29,73%. Sumber informasi lainnya diberikan oleh Tokoh Masyarakat sebanyak 27,03% dan Partai Politik sebanyak 24,32%. Justru KPUD dinilai responden dalam memberikan informasi tentang pilkada sangat rendah hanya 10,81%.

Pada bagian lain, ketika ditanyakan siapa lembaga yang seharusnya bertugas memberikan

informasi tentang pilkada, ternyata KPUD dinilai 44,90% responden sebagai lembaga yang seharusnya memberikan informasi tentang pilkada. Selanjutnya partai politik dan tokoh masyarakat dinilai juga sebagai lembaga yang seharusnya turut serta dalam mensosialisasikan tentang pilkada.

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan kajian beberapa lembaga yang mengkaji tentang pilkada menunjukkan bahwa proses sosialisasi politik tentang pilkada, baik berupa publikasi informasi pilkada dan pendidikan pemilih sebagai

usaha meningkatkan angka melek politik yang menjadi tugas KPUD masih belum optimal. Senada dengan hal tersebut, komisioner KPUD Kabupaten Lampung Timur, mengungkapkan bahwa:

“Rangkaian tugas KPUD dalam mengelola pilkada sangat panjang dan menguras energi yang besar, rangkaian tahapan pilkada tidak hanya fokus pada pendidikan pemilih. Namun, sebagai tanggung jawab penyelenggara pilkada KPUD sudah menjadwalkan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Hanya saja keterbatasan anggaran asih menjadi hambatan utama dalam penguatan partisipasi masyarakat” (Hasil wawancara : Wasiyat Jarwo, 24 Oktober 2016).

Menghubungkan antara hasil penelitian, kajian evaluasi pilkada dan hasil wawancara menunjukkan bahwa selain persolan akurasi data pemilih, sebab lainnya adalah terbatasnya proses sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kondisi demikian berimplikasi terhadap beberapa faktor penyebab perilaku *non voting* di atas, namun demikian peran serta masyarakat menjadi kata kunci dalam penguatan partisipasi dalam pemilihan kepala daerah. KPUD dengan sejumlah keterbatasan perlu terus didorong dalam menyempurnakan kualitas pilkada, baik secara prosedur maupun substansinya.

### INDIKATOR DOMINAN PRILAKU *NON VOTING*

Pada uraian sebelumnya teridentifikasi faktor utama yang menyebabkan perilaku *non voting* dalam pilkada di Lampung Timur, khususnya di Kecamatan Way Jepara menunjukkan faktor teknis merupakan faktor dominan, meskipun demikian pertimbangan responden terhadap faktor lainnya patut menjadi pertimbangan. Keempat faktor perilaku *non voting* masing-masing memiliki indikator yang berbeda jumlahnya. Faktor teknis politis memiliki 5 indikator, faktor teknis terdapat 6 indikator, faktor politis 6 indikator, dan faktor ideologis terdiri dari 6 indikator. Secara keseluruhan, terdapat 4 faktor dan 23 indikator dalam pemetaan perilaku *non voting*.

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa perilaku *non voting* yang disebabkan faktor politis menunjukkan 2,04% disebabkan responden tidak menerima undangan pemilihan dan 6,12% terdapat responden yang dari awal tidak ingin didaftarkan sebagai pemilih pada saat pilkada.

Pada faktor teknis terdapat 5 indikator yang menyebabkan *non voting*, yaitu: indikator keperluan keluarga (20,41%); Kesehatan (18,37%); Lupa (6,12%); Jarak Ke TPS Jauh (2,04%); dan Pertimbangan Pekerjaan (28,60%). Indikator pertimbangan pekerjaan merupakan indikator yang paling signifikan dalam mempengaruhi perilaku *non voting*.

**Tabel 5.** Faktor dan Indikator Utama Responden Tidak Memilih

Faktor Utama Tidak Memilih	Indikator Tidak Memilih	Frek	Persen
Teknis Politis	Undangan Tidak Sampai Ke Pemilih	1	2,04
	Tidak Menginginkan didaftarkan sejak awal	3	6,12
Teknis	Keperluan Keluarga	10	20,41
	(Kesehatan (Sakit	9	18,37
	Tidak Ingat / Lupa	3	6,12
	Jarak Ke TPS Jauh	1	2,04

	Pertimbangan Pekerjaan	14	28,60
Politik	Kandidat dianggap tidak mampu	4	8,16
	Janji-Janji Calon Tidak Bisa Dipercaya	1	2,04
	Tidak Percaya Pilkada Membawa Perubahan	1	2,04
Ideologis	Pemerintah Tidak Mampu Memenuhi Kebutuhan Rakyat	1	2,04
	Kebebasan demokrasi tidak menjadikan masyarakat lebih baik	1	2,04
Jumlah		49	100,00

Sumber : Hasil Penelitian, 2016

Pada faktor politik terdapat 3 indikator yang mempengaruhi, yaitu: kandidat atau calon kepala daerah dianggap tidak mampu sebanyak 8,16%, Janji-janji calon tidak bisa dipercaya 2,04%, dan ketidakpercayaan bahwa pilkada membawa perubahan. Untuk faktor ideologis terdapat 2 indikator yang mempengaruhi, yaitu: pemerintah daerah dinilai tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyat sebanyak 2,04%, dan kebebasan demokrasi tidak menjadikan masyarakat lebih baik sebanyak 2,04%.

Berdasarkan uraian tabel 5, faktor yang paling dominan adalah faktor teknis, sedangkan indikator yang paling dominan adalah indikator pertimbangan pekerjaan, keperluan keluarga dan kesehatan (sakit). Dengan data tersebut, menunjukkan bahwa *non voting* saat pilkada di Lampung Timur tahun 2015 yang lalu lebih dipengaruhi oleh kondisi teknis pemilih. Data tersebut menunjukkan bahwa pemilih belum menjadikan agenda pilkada sebagai hal yang sangat urgen untuk diprioritaskan.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perilaku *non voting* dalam pemilihan kepala daerah di Lampung Timur dengan faktor dan indikator yang menyebabkannya, terdapat beberapa rumusan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prilaku *Non Voting* disebabkan sebanyak 51% responden tidak dapat ditemui atau diwancarai

yang disebabkan, 86,3% yang sudah sejak lama atau sebelum pilkada sudah pindah doisili, 7,8% sudah meninggal dunia dan 5,9% dalam kondisi sakit parah atau hilang kesadaran.

2. Mayoritas responden atau sebanyak 37 responden (75%) tidak memilih disebabkan faktor teknis, faktor teknis politik 8,2%, faktor politik 12,2% dan 4,1% dikarenakan faktor ideologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab perilaku *non voting* dalam pilkada Lampung Timur lebih disebabkan faktor teknis.
3. Sumber utama responden dalam mengakses informasi tentang pemilihan kepala daerah paling banyak justru diperoleh dari kerabat sebanyak 29,73%. Tokoh Masyarakat sebanyak 27,03% dan Partai Politik sebanyak 24,32%. Sedangkan KPUD hanya 10,81%, Sedangkan lembaga yang seharusnya bertugas memberikan informasi tentang pilkada, ternyata KPUD dinilai 44,90% responden.
4. Terdapat 4 faktor dan 23 indikator dalam pemetaan perilaku *non voting*, indikator yang paling mempengaruhi perilaku *non voting* adalah (1) indikator keperluan keluarga (20,41%); (2) Kesehatan (18,37%); dan (3) Pertimbangan Pekerjaan (28,60%).

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas terdapat beberapa saran perbaikan sebagai berikut:

1. Penataan DP4 sebagai rujukan DPT harus dilakukan secara cermat, sehingga akurasi data pemilih tidak terlalu timpang dengan data pada saat pemilihan.
2. Untuk mengurai permasalahan perilaku *non voting* yang disebabkan faktor teknis politik dan teknis, KPUD bersama partai politik dan tokoh masyarakat secara terus menerus melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan angka melek politik dan penguatan partisipasi politik.
3. Pemerintah daerah dan DPRD harus meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik untuk meningkatkan kepuasan masyarakat untuk mengembalikan kepercayaan publik dengan sistem pemilihan langsung.
4. Selanjutnya, partai politik semakin selektif dalam melaksanakan rekrutment politik saat mengusung calon-calon kepala daerah sehingga menghasilkan calon-calon yang dipercaya oleh masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2009. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Agustino, Leo. 2007. *Perihal Ilmu Politik*. Grahan Ilmu. Yogyakarta.
- Asfar, Muhammad. 1998. *Perilaku Non Voting Di Bawah Sistem Politik Hegemonik*, Tesis Program Studi Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.
- Ariyanto, Bismar. 2011. *Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu*, Dalam Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Eko, Sutoro. 2006. *Meletakkan Desa Dalam Desentralisasi dan Demokrasi* dalam Abdul Gaffar Karim: *Kompleksitas Persoalan otonomi Daerah Di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Fatah, R. Eep Saefulloh. 1994. *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia* Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Firmanzah. 2008. *Marketing Politik : Antara Pemahaman dan Realitas*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Gaffar, Affan. 2004. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Nursal, Adman. 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sanit, Arbi. 1992. *Aneka Pandangan Fenomena Golput*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Rahman.A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Saragih, Bintan R. 1997. *Fungsi Perwakilan, Pembuatan Keputusan, dan Pembentukan Legitimasi*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Depdagri, Jakarta.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Surbakti, dkk. 2011. *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutahiran Daftar*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Jakarta.
- Prihatmoko, Joko J. 2008. *Mendemokratiskan Pemilu, Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Roth, Dieter. 2008. *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-Teori, Instrumen dan Metode*. Fur Die Freiheit. Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 *Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 *Tentang Partai Politik*.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 *Tentang Pemilihan Umum* PKPU NO. 2 Tahun 2015 – Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dokumen kerja KPU Lampung Timur 2015.

<http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/4467/775-Persen-Target-Nasional-Partisipasi-Masyarakat-di-Pilkada-2015> diakses tanggal 5 Maret 2016.